

Sosialisasi Pentingnya Kesadaran Warga Negara Mewujudkan Pemilu Damai Dan Jujur Tahun 2024 Di Kelurahan Sei Agul

¹⁾Maringan Panjaitan, ²⁾Vera A. Pasaribu, ³⁾Jonson Rajagukguk, ⁴⁾Dimpos Manalu, ⁵⁾Silvia Gea, ⁶⁾Ridhon M B Simangunsong, ⁷⁾Lasma Siagian

^{1,2,3,4)}Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas HKBP Nommensen

⁵⁾Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas HKBP Nommensen

⁶⁾Dosen tetap Administrasi bisnis Fisip, Universitas HKBP Nommensen

⁷⁾Dosen tetap Prodi Ekonomi Pendidikan FKIP, Universitas HKBP Nommensen

Email: maringan.panjaitan@uhn.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Partisipasi Politik, Kesadaran Warga Negara, Pemilu 2024	Pemilu yang damai dan jujur adalah tujuan utama yang harus kita pahami dan sepakati bersama agar bisa menjadi sarana untuk menegakkan kedaulatan negara yang baik dan benar. Dalam pemilu warga negara diberikan kebebasan sebebas-beasnya dan dijamin oleh konstitusi untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Melalui pemilu warga negara akan datang ke tempat pemungutan suara dan sudah di atur oleh negara melalui regulasi khusus tentang pemilihan umum. Warga negara akan memberikan hak politiknya agar kedepan tercipta struktur pemerintahan yang akan menyelenggarakan tata kelola negara untuk pelayanan publik dan percepatan pembangunan. Masalahnya, bagaimana mewujudkan pemilu yang damai dan jujur dengan berbagai indikatornya adalah tujuan yang kita inginkan bersama. Untuk itulah penting kesadaran semua warga negara bagaimana agar pemilu yang damai dan jujur bisa terwujud dengan baik pada tahun 2024 bagi masyarakat Jalan Sekata Kelurahan Sei Agul Medan sebagai warga negara yang sudah mempunyai hak pilih dengan baik.
Keywords: Political Participation, Citizen Awareness, 2024 Election	ABSTRACT Peaceful and honest elections are the main goal that we must understand and agree on together so that they can become a means of upholding good and true state sovereignty. In elections, citizens are given the greatest freedom and are guaranteed by the constitution to channel their political aspirations. Through elections, citizens will come to the voting stations and this has been regulated by the state through special regulations regarding general elections. Citizens will give their political rights so that in the future a government structure will be created that will organize state governance for public services and accelerate development. The problem is, how to realize peaceful and honest elections using various indicators is the goal we all want. For this reason, it is important for all citizens to be aware of how to achieve peaceful and honest elections in 2024 for the people of Jalan Sekata, Sei Agul Village, Medan, as citizens who already have the right to vote properly.
This is an open-access article under the CC-BY-SA license.	
	

I. PENDAHULUAN

Keberhasilan sebuah negara dalam membangun dan melembagakan politiknya sangat tergantung sejauh mana partisipasi politik warganya dalam politik. Pemilu yang diselenggarakan oleh sebuah negara dengan jaminan UU dan jaminan konstitusional adalah sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu rakyat memberikan hak politiknya dan partisipasinya untuk menentukan amsa depan pemerintahan lima tahun kedepan.

Jika kita lihat sebuah kasus di Kota Medan pada beberapa waktu yang silam mislanya bahwa golput bisa jadi sebuah pilihan politik yang bisa jadi masalah kedepannya karena menganggap legalitas pemilu kedepan.

Rendahnya partisipasi politik masyarakat (*political participant society*) dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) di Kota Medan beberapa tahun yang lalu misalnya sebagai sebuah kasus masalah golput dari berbagai kasus lainnya. Pilkada sebagai proses politik (*political process*) dalam mencari figur Kepala Daerah yang merakyat kembali diperhadapkan dengan golput yang terus menerus keluar sebagai pemenang (*the winner player*). Partisipasi pemilih berkisar 20 s/d 30 persen saja. Artinya angka golput sudah pasti sampai pada angka 70 persen lebih. Persentase itu naik dibandingkan partisipasi pemilih pada Pemilu Gubernur Sumut tahun 2013 yakni sebesar 43% atau 625.067 pemilih dari 1.433.551 pemilih terdaftar. Sedangkan partisipasi pemilih pada Pilkadkota Kota Medan hanya sampai kisaran 20 s/d 30 persen.

Mengapa golput sering (terus) menang dalam setiap event pilkada? Bahkan golput menang dalam pilkada Kota Medan? Apakah golput sebagai sikap politik (*political principle*) rakyat yang kritis patut dijadikan sebagai ancaman demokrasi? Di negara-negara maju fenomena golput bukan sesuatu hal yang menakutkan. Persentase golput di negara –negara maju sangatlah kecil. Tradisi masyarakat negara maju memilih sangat tinggi. Mereka berduyun –duyun akan terjun ke TPS jika sudah waktunya pemilu (apakah eksekutif dan legislatif). Tradisi fanatisme pemilih muncul di negara maju karena memang pilihan mereka sangat menentukan nasib mereka.



Gambar 1. Lokasi PkM

Bagaimana dengan kondisi negara kita dimana tiap tahun tradisi memilih pemimpin dalam setiap pilkada cenderung mengalami penurunan (golput). Pertanyaannya, mengapa masyarakat lebih (cenderung) memilih golput sebagai sikap politik? Padahal masa depan mereka lima tahun sangat ditentukan oleh kualitas pemimpin di daerahnya. Sikap apatisisme masyarakat ini harus dijadikan sebagai ancaman demokrasi.

Jangan kita samakan golput di negara maju sebagai sikap politik dengan golput di negara yang sedang dalam transisi demokrasi. Konteks golput di negara maju sangat beda dengan negara kita. Golput di negara maju merupakan rasionalitas politik. Mungkin dia melihat si calon tidak layak, dan tidak terjadi secara kolektif, hanya personal.

Di negara kita golput terjadi secara kolektif (bersama), bukan personal. Fenomenanya sama dengan (satu) alasan yang sama. Alasan masyarakat menjadi golput kalau diambil semua jawaban bisa dipastikan 90 persen jawabnya sama, yaitu siapapun yang terpilih jadi pemimpin tetap akan korupsi. Siapun pemimpin nasib kita tetap seperti ini –ini saja. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa muncul tulisan ini.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

- 1) Memberikan pemahaman tentang pentingnya kesadaran warga negara dalam hal ini masyarakat Jalan Sekata Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat mengenai pemilu 2024.
- 2) Memberikan solusi dalam membangun sistem tata kelola pemilu 2024 berbasis kesadaran warga negara.
- 3) Membangun sistem pemilu yang bisa mengakomodir berbagai aspirasi yang bagus untuk pemilu 2024 ini.

II. METODE SOSIALISASI

Metode sosialisasi adalah dengan model ceramah bagi masyarakat Jalan Sekata di Kecamatan Medan Barat Kota Medan mengenai hubungan kesadaran warga negara dengan pemilu 2024 agar berjalan dengan sukses, damai, dan jujur.

III. PEMBAHASAN

Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

Adapun yang menjadi Tujuan Pemilu Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- 1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).
- 2) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- 3) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggali dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.



Gambar 2. Kegiatan PkM

Sedangkan yang menjadi fungsi Fungsi Pemilihan Umum Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk: 1) Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia. 2) Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). 3) Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

Memang kita akui ketika masyarakat memilih kepala daerah (Gubernur/ Walikota dan Bupati) secara langsung yang dimulai dari tahun 2004 yang lalu harapan masyarakat adanya perubahan secara radikal. Konsep pembangunan kearifan lokal yang digadang-gadang akan mampu memperbaiki nasib mereka tidak kunjung datang. Bahkan desentralisasi korupsi makin merajalela. Bupati dan Walikota yang terpilih bukan fokus dalam mengurus rakyatnya sebagaimana yang diamanatkan oleh UU. Bahkan pada pilkada selanjutnya yang dimulai tahun 2008/2009 fenomena yang sama. Aktivitas pemerintah begitu-begitu saja. Tidak ada terobosan yang berarti yang bisa mengangkat derajat hidup masyarakat daerah. Kecenderungan korupsi tetap terjadi.

Apa yang diharapkan oleh masyarakat pada Bupati dan Walikota dalam bentuk perbaikan infrastruktur jalan, kesehatan, dan pendidikan tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Dimana-mana jalan hancur lebur, kualitas air minum tidak bagus, biaya sekolah mahal sekalipun anggaran pendidikan sangat besar. Bahkan banyak lagi kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat.

Tujuan otonomi daerah yang dirumuskan oleh pemerintah dalam rangka mendekatkan pemerintahan kepada rakyat supaya percepatan pembangunan dan percepatan pelayanan publik dapat terwujud, gagal sama sekali. Banyak Pejabat dan Kepala Daerah yang ditangkap oleh KPK karena korupsi. Korupsi di daerah menjadi isu nasional. Tata kelola anggaran makin runyam karena cenderung disalahgunakan oleh pemda. Semua ini berefek pada tidak jalannya pemerintahan yang efektif dan efisien. Akhirnya, kualitas hidup masyarakat tidak berubah.

Sementara biaya untuk melaksanakan pilkada sangatlah besar. Anggaran untuk pilkada per Kabupaten mencapai rata-rata 18 miliar untuk satu putaran. Anggaran yang besar ini dianggap mubazir kalau hanya

untuk melahirkan Bupati dan Walikota yang korup. Akibatnya wacana model pemilihan kepala daerah secara langsung pun perlu ditinjau ulang. Proses demokratisasi yang diharapkan melalui pilkada tidak berjalan sesuai dengan skenario. Siapa yang patut dipersalahkan dengan carut marutnya pilkada kita sekarang ini?

Secara sistem, model pilkada secara langsung sudahlah tepat. Implementasinya yang jauh dari ontologi pilkada langsung ini. Pilkada langsung tanpa diimbangi dengan persiapan yang matang, persiapan SDM telah membuat masyarakat alergi dengan pilkada. Mengapa tidak, semua calon menjanjikan perubahan yang radikal untuk perbaikan hidup masyarakat. Setelah terpilih apa yang dijanjikan tidak juga terealisasi. Bahkan dalam setiap event pilkada sering terjadi konflik sosial, semua calon yang kalah rame-rame menggugat ke Mahkamah Konstitusi, akibatnya pendidikan politik yang memberikan kesadaran kepada masyarakat nihil sama sekali.

Inilah yang memicu sikap masyarakat untuk golput dan merupakan sikap politik. Apakah masyarakat patut dipersalahkan dengan pilihan politiknya ini? Tentu tidak. Sekalipun peran civil society merupakan prasyarat mutlak dalam konsolidasi demokrasi modern sebagaimana yang dikatakan oleh Juan J Linz dan Alfred Stepan (1996), masyarakat tidak bisa langsung dipersalahkan.

Ini adalah hubungan sebab akibat (kausalitas). Ketika pemerintah menyatakan dirinya sebagai pemerintahan yang merakyat, nyatanya pemerintahan yang culas masyarakat akan melihat ini sebagai kebohongan besar. Akibatnya masyarakat hanya melihat pemerintahan ini adalah bentuk oligarki elite semata. Pemerintah hanya milik sekelompok orang yang punya akses mengendalikan pemerintahan. Akses masyarakat miskin sangat lemah kepada pemerintah daerah karena bargaining posisinya sangat rendah. Akibatnya, masyarakat kita menjadi masyarakat yang sangat apatis kepada pemerintahan.

Pemerintahan daerah yang miskin kreasi, tetapi subur korupsi memicu masyarakat makin apatis. Ketika muncul pilkada, padahal menentukan nasib masyarakat itu sendiri, masyarakat lebih memilih golput dengan satu alasan, pilkada tidak akan mengubah nasib mereka. Pola pikir seperti ini harus dilihat pemerintah sebagai ancaman. Pemerintah pusat perlu melakukan kebijakan.

Misalnya, siapa kepala daerah terpilih harus menjalankan pemerintahannya secara terukur. Pemerintah pusat perlu membuat beberapa indikator capaian pemerintahan yang sukses. Semua kepala daerah perlu mencapai capaian indikator ini yang muaranya adalah percepatan dan peningkatan kualitas layanan publik. Dengan demikian semua pemda akan berusaha maksimal untuk menjalankan roda pemerintahannya dengan baik karena adanya target capaian yang dibuat oleh pemerintahan pusat.

Pemerintah pusat harus mampu mengambil hati masyarakat dengan terus mendorong pemerintah daerah adalah pemerintahan yang melayani dengan baik. Dengan demikian masyarakat akan berubah dan mengatakan betapa pemerintahan itu sangat penting dalam proses pembangunan daerah. Yang ada di pikiran masyarakat kita saat ini adalah bahwa pemerintahan itu hanya milik beberapa orang saja. Praktiknya memang seperti itu. Akibatnya memicu apatisme masyarakat kepada setiap aktivitas politik pemerintahan, termasuk pilkada.

Pilkada Kota Medan yang hanya menempatkan partisipasi masyarakat 20 persen s/d 30 persen memberikan kita sebuah pesan khusus, golput kedepannya akan semakin kuat dan melembaga. Apa upaya yang bisa dilakukan mencegah golput ini tidak bisa lagi dengan himbauan semata (iklan, alat peraga, dsb). Perlu sebuah terobosan yang brilian dengan cara meningkatkan kinerja pemerintahan menjadi pemerintahan yang merakyat, melayani dan visioner. Hanya dengan cara inilah angkat golput bisa dikurangi. Karena kepercayaan (trust) masyarakat pada pemerintah sudah hilang atau tidak percaya lagi. Siapapun walikota pasti semua urusan musti dengan uang atau tetap juga dengan uang.

Untuk itu, action adalah hal yang utama. Bagaimana pemerintah daerah, pemerintah pusat menempatkan dirinya sebagai pelayan masyarakat yang sesungguhnya adalah esensi yang harus dilakukan kalau ingin melihat golput bukan lagi sebagai sikap politik dan pemenang. Kata kuncinya (political willnya) ada sama pemerintah. Dan untuk itulah Pemko Medan dengan Walikota yang baru harus bekerja ekstra keras untuk itu.

Fenomena golput yang menjadi pemenang pada pilgubsu 7 Maret 2013 menjadi bahan yang terus menjadi fokus diskusi di Sumatera Utara. Para analis politik di Sumatera Utara melalui Opini Harian SINDO Sumut terus mengupas mengapa golput bisa menjadi pemenang pada pilgubsu 2013. Terkejutkah kita golput bisa menang pada pilgubsu 2013? Setidaknya pertanyaan yang sangat sederhana ini mengawali tulisan ini mengapa golput bisa menang pada pilgubsu 2013. Bagi penulis secara pribadi munculnya golput sebagai

pemenang bukan hal yang asing. Pada pemilihan Walikota Medan 2010 pun golput keluar sebagai pemenang. Memang tidak sebesar sekarang (pilgubsu 2013) persentasenya.

Golput sudah sering menjadi pemenang dalam setiap pelaksanaan pilkada di berbagai daerah. Kemenangan golput bukan hal yang asing lagi dalam demokrasi kita. Tentu yang menjadi pembahasan adalah sejauh mana golput mempengaruhi kualitas demokrasi yang sedang kita bangun bersama? Sementara fakta mengatakan pola partisipatoris warga dalam pembangunan bangsa sangat signifikan. Di negara-negara maju seperti Eropa barat, Jepang, Korea Selatan dukungan warga sangat signifikan bagi kemajuan negaranya. Asumsinya, semakin terdidik masyarakat semakin kuat kontrol pada penyelenggara negara.

Pada akhirnya elit-elit politik tidak bisa main-main lagi. Mereka ikut memperbaharui dirinya dan melakukan instropeksi karena kemajuan masyarakat tersebut. Dari sini dapat kita lihat tingkat pendidikan masyarakat yang bergerak maju ikut mempengaruhi kemajuan sebuah bangsa. Artinya, pemimpin yang merakyat lahir dari proses yang baik dan benar. Pada saat pemilihan langsung adalah sebuah pilihan yang dihadapkan pada masyarakat, apakah metode yang dianggap demokratis ini langsung menghasilkan seorang pemimpin yang baik, khususnya Gubernur dan Bupati beserta wakilnya?

Fakta mengatakan, evaluasi dari berbagai lembaga riset menunjukkan bahwa otonomi daerah cenderung gagal. Terlepas faktor yang mempengaruhinya. Otonomi daerah yang dulunya diharapkan mampu menjawab persoalan daerah dalam bentuk percepatan pembangunan, pendekatan pemerintahan kepada rakyat tidak sesuai dengan harapan rakyat. Bahkan yang paling menonjol adalah desentralisasi korupsi. Ada 174 kepala daerah berdasarkan data 2012 yang sedang dalam proses hukum. Ini merupakan sebuah gambaran bahwa otonomi daerah cenderung mengalami kegagalan. Menyelamatkan otonomi daerah mutlak diperlukan pemimpin yang mampu memberikan pelayanan yang baik pada rakyat dengan komitmen dan integritas yang tinggi.

Berangkat dari kegagalan otonomi daerah dan aji mumpung kepala daerah maka muncullah apatisme yang tinggi dikalangan rakyat. Pemerintah dimata rakyat adalah sekelompok oligarki lokal yang hanya mementingkan diri sendiri. Bahkan masyarakat sampai beranggapan tanpa pemerintahan aktivitas rakyat tetaplah jalan. Ini adalah sebuah kondisi yang tidak bagus di tingkat lokal. Bagaimana mengatasi ini dibutuhkan pemimpin di tingkat lokal yang transformatif dan aspiratif.

Dalam konteks Sumatera Utara, apakah kepemimpinan transformatif dan aspiratif terhadap kepentingan rakyat sudah terwujud dengan baik? Indikator kesana pun belum ada. Survei beberapa lembaga independen, bahkan KPK pada tahun 2011 pernah menempatkan daerah ini daerah paling korup. Pejabat di Sumatera Utara pun banyak yang berurusan dengan Jaksa, KPK karena terlibat persoalan korupsi. Tampilan SUMUT dengan sebutan semua urusan musti dengan uang tunai menjadi benar dalam konteks Sumut sebagai daerah yang sangat korup. Dalam hal inilah pesimisme berpemerintahan Sumut muncul dikalangan rakyat.

Berangkat dari apatisme rakyat pada pemerintahan, apakah mereka bisa kita salahkan ketika mereka tidak memberikan suaranya pada 7 Maret 2013 kemarin? Salahkan mereka mendesah dengan ucapan yang sangat sederhana, “siapapun gubernur nasib kemai seperti ini”. Berangkat dari desahan ucapan inilah banyak warga Sumut menjadi golput. Mereka memilih golput dengan alasan membuang energi untuk memilih. Toh pada akhirnya mereka akan membentuk oligarki lokal di Sumut. Sikap apatisme publik ini bukan tanpa alasan. Sementara yang dibutuhkan oleh rakyat bukanlah hal yang sulit.



Gambar 3. Foto Bersama

Mereka hanya butuh jalan, sarana air minum, harga sembako jangan terlalu tinggi. Permintaan rakyat sangat sederhana. Mereka tidak minta rumah, mobil, atau barang mewah lainnya. Bagaimana pemerintah menyanggupi permintaan rakyat yang sangat sederhana ini tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah. Bahkan konsep anggaran dalam struktur APBD tidak pernah berpihak kepada masyarakat.

Biaya-biaya untuk belanja pegawai lebih besar daripada belanja untuk publik. Ini sungguh sebuah kondisi yang sangat ironis. Bagaimana keberhasilan pembangunan bisa berhasil dengan struktur APBD yang tidak pernah berpihak kepada masyarakat. Munculnya apatisme rakyat pada pemerintahan, termasuk golput dalam setiap pemilu secara psikologis bisa kita maklumi.

Ketika golput menjadi pemenang pada pilgubsu 2013 ini merupakan sebuah simbol kekecewaan masyarakat pada pemerintah sudah sampai pada titik nadir. Apakah kehadiran golput menjadi momok yang menakutkan pada kita semua? Sebelum tiba sampai pada sebuah konklusi bahwa golput itu merugikan pada perkembangan demokrasi, memahami mengapa golput menjadi pemenang jauh lebih penting daripada menyalahkan golput tersebut.

Mengapa golput bisa menang dalam pilgubsu 2013 merupakan bentuk golput berkonstitusi. Dasar hukum golput sangatlah jelas, gagalnya pemerintah Sumatera Utara menjadi pemerintahan yang baik, pemerintahan merakyat, pemerintahan yang melayani merupakan penyebab munculnya golput menjadi pemenang pada pilgubsu 2013. Golput muncul sebagai fenomena ketika rakyat sudah apatis dan muak dengan kondisi pemerintahan yang tidak pernah berpihak kepada masyarakat. Jelaslah bahwa golput berkonstitusi merupakan fakta kegagalan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan yang berpihak atau berbasis rakyat.

IV. KESIMPULAN

Pemilu yang damai adalah tanggung jawab kita semua. Dengan pemilu damai dan jujur ada harapan untuk memperoleh pemimpin yang baik (DPR dan Presiden/ Wapres). Pemilu damai harus disosialisasikan kepada semua komunitas, bagaimana agar pemilu damai ini bisa terwujud dengan baik. Tidak ada alasan untuk tidak mewujudkan dan membumikan pemilu yang damai dan jujur. Masyarakat Di Jalan Sekata Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan, sebagai salah satu komunitas yang juga diharapkan menjadi partisipan dalam pemilu sangat kita harapkan ikut dalam mendukung dan mendorong pemilu yang damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. M. D., & Yusof, H. (2011). Quality and qualitative studies: The case of validity, reliability, and generalizability. *Issues in Social and Environmental Accounting*, 5(1/2), 25-26
- Basri, H. (2014). Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda. *Journal of US-China Public Administration*, October 2014, Vol.11, No.10, 831-838. DOI: 10.17265/1548-6591/2014.10.003
- Chua, W.F. (1986). Radical Developments in Accounting Thought. *The Accounting Review*, Vol. 61, No. 4 (Oct., 1986), pp. 601-632.
- Evans, Kevin Raymond, *Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, PT Arise Consultancies, Jakarta, 2003.
- Feith, Herbert, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 1999.
- Haris, Syamsuddin (Editor), *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Yayasan Obor Indonesia – PPW LIPI, Jakarta, 1998.